



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DISAMPAIKAN DALAM :
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 17 JUNI 2021**

**DI BACAKAN OLEH:
H. SETIA BUDI WIBOWO, S.Ag, M.M**

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Yang Kami Hormati, Gubernur Jawa Tengah

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Jajaran Eksekutif, Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran *Allah Subhanahu wata'ala*, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Salam serta sholawat semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita, *Rosululloh Muhammad SAW* beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir jaman.

Pada kesempatan ini, Fraksi PKS mengucapkan Selamat kepada Gubernur Jawa Tengah dan segenap jajarannya atas perolehan prestasi **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis akrual Tahun Anggaran 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak Tahun 2012. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.**

Hadirin yang kami hormati,

Berikut kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

1. Fraksi PKS mengapresiasi positif tercapainya Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp26,633 trilyun atau 99,38% dari target sebesar Rp26,798 trilyun dan lebih tinggi di bandingkan tahun 2020 sebesar Rp25,394 trilyun. Walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya tetapi di sisi lain menunjukkan kinerja keuangan daerah yang kurang memuaskan dari segi pendapatan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 99,38% dari target yang direncanakan. Beberapa jenis pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah gagal mencapai targetnya. Mohon penjelasan Saudara Gubernur apa yang menyebabkan pajak dan retribusi daerah tidak mencapai target. Hal ini harus dijelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan mencapai target agar Pemerintah dapat memperoleh pelajaran penting dari keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan

anggaran tahun lalu untuk perbaikan kebijakan tahun mendatang.

2. Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2023 adalah dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tetapi sayangnya semangat ini tidak terwujud dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 yang belum bisa menggambarkan keterjangkauan/pencapaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021. Oleh karena itu kami berharap dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mendatang harus dilaporkan juga capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya, sehingga capaian RPJMD dapat terlihat dengan jelas.
3. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah pada tahun 2021 naik 0,29 poin menjadi 72,16 dari tahun 2020 yang sebesar 71,87. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,95 persen dibanding tahun 2020. Tetapi Jawa Tengah masih mempunyai pekerjaan besar untuk meningkatkan IPM. Fraksi PKS meminta agar Pemerintah segera menyusun kebijakan (pendampingan/fasilitasi) program dan anggaran secara khusus

bagi Kabupaten dan Kota (IPM Rendah dan kemiskinan tinggi) serta asistensi dan monitoring secara komprehensif.

4. Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target PAD Tahun 2021 diproyeksikan meningkat sebesar 5,66 persen dibandingkan proyeksi pada rencana perubahan tahun 2020. Dengan akan berakhirnya pandemi Covid-19 maka perlu adanya upaya untuk peningkatan target pendapatan daerah 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menjaga kemandirian fiskal daerah. Upaya mencapai target pendapatan dengan cara inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah dan mendukung prioritas pembangunan daerah (kemiskinan, pengangguran dan pangan) maupun optimalisasi kinerja BUMD Jawa Tengah untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini dan mendatang, mohon penjelasnya.
5. Belanja daerah pada tahun 2021 prioritasnya masih diarahkan pada penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 disamping prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan serta penyesuaian penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah dan dukungan pendanaan belanja kesehatan. Untuk itu pada tahun anggaran mendatang Pemerintah Jawa Tengah harus mengutamakan belanja produktif dengan tetap berpedoman pada prioritas dan fokus program kegiatan

sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023, khususnya pada belanja yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar (sektor pendidikan dan kesehatan, belanja untuk pemulihan ekonomi dan belanja insfrastruktur).

6. Pemerintah daerah diharuskan untuk kreatif dalam mendapatkan sumber dana, sehingga mampu menunjang keuangan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana daerah adalah dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini mempunyai tujuan tertentu, yaitu pengelolaan potensi pajak & retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah merupakan sumbangan wajib untuk daerah otonom berasal dari diri pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasar Undang-undang. Sedangkan, retribusi daerah adalah pungutan untuk membayar jasa yang secara khusus diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan bagi keperluan pribadi atau badan. Dengan belum tercapainya pendapatan daerah maka masih ada potensi pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal. Maka sudah seharusnya Pemerintah melakukan kajian tentang penghitungan potensi pajak dan retribusi, pendataan ulang wajib pajak; inovasi pelayanan pajak dan retribusi berbasis sistem teknologi informasi; pengelolaan kekayaan daerah; serta penyehatan BUMD dan BLUD di Jawa Tengah. Mohon penjelasan Saudara Gubernur apakah hal-hal diatas sudah dilakukan.
7. Belanja modal sebagai bentuk investasi pemerintah dalam pembangunan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan belanja modal dilakukan untuk menambah aset milik daerah dan dapat dijadikan alat meningkatkan penerimaan daerah, khususnya PAD. Melihat pentingnya belanja modal

dalam meningkatkan belanja aset dan PAD, maka Pemerintah Jawa Tengah perlu meningkatkan alokasi Belanja Modal secara gradual untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah demi peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dan pemenuhan target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

8. Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah pada bulan September 2021 berjumlah 3,934 juta orang (11,25%) berkurang sejumlah 185,92 ribu orang (0,59%) atau lebih rendah dari bulan September 2020 berjumlah 4,119 juta orang (11,84%). Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan dimasa pandemi COVID-19. Walaupun menunjukkan tren positif penurunan jumlah penduduk miskin nyatanya hasil program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatannya. Hal ini menunjukkan Pemerintah Jawa Tengah belum optimal mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satker terkait. Dan pada akhirnya pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal mendorong masyarakat miskin mengembangkan aset produktif untuk pendapatan secara berkelanjutan. Oleh karenanya kami merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menetapkan dan menerapkan mekanisme koordinasi yang baik dalam perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

9. Tingkat inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 mampu dikendalikan sebesar 1,7% dan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2021 (sebesar 1,87%). Pada tahun 2021 inflasi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2020 (sebesar 1,56%), kenaikan inflasi tersebut masih dalam batas kewajaran seiring perbaikan ekonomi. Berdasarkan data ekonomi menunjukkan bahwa laju inflasi mampu ditekan dibawah 3% selama 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah bekerja cukup baik. Tren penurunan inflasi berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Untuk itu tugas berat Pemerintah adalah menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan kualitas belanja pemerintahan, meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksesibilitas dan kelancaran aktifitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai keadilan Sejahtera atas Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Wassalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH


H.AGUNG BUDI MARGONO,S.T,M.T
KETUA


H.RIYONO,S.Kel, M.Si
SEKRETARIS